

Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2010-2013)

Marazaenal Adipta

Jurusan Pendidikan Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

email: adiptamarazaen@yahoo.com, @undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2010-2013, (2) kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2010-2013, dan (3) kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2010-2013 dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan wawancara yang dianalisis menggunakan rasio keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lombok Tengah NTB tahun 2010-2013 dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi *real* masyarakat. (2) Kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2010-2013 rata-rata berada dalam katagori yang kecil sehingga dapat dikatakan Kabupaten Lombok Tengah belum mampu untuk melaksanakan otonomi daerah jika dilihat dari kemampuan keuangan daerah, dari hasil perhitungan rasio keuangan daerah antara lain rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan, hanya rasio pertumbuhan yang menggambarkan Kabupaten Lombok Tengah sedikit mampu dalam menjalankan otonomi daerah, dan (3) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2010-2013 dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lombok Tengah masih kecil.

Kata kunci : pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan keuangan daerah, PAD

Abstract

This study aims to determine (1) the implementation of regional autonomy in Central Lombok West Nusa Tenggara (NTB) 2010-2013, (2) the ability of local finance in the implementation of regional autonomy in Central Lombok West Nusa Tenggara (NTB) 2010-2013 , and (3) the contribution of the Local Revenue and Expenditure Budget 2010-2013 in supporting the implementation of regional autonomy in Central Lombok. This research is descriptive qualitative and quantitative. Data collected by the method of documentation and interviews were analyzed using financial ratios area. The results showed that (1) The implementation of regional autonomy in Central Lombok NTB 2010-2013 carried out in accordance with the applicable rules and adapted to the real conditions of society. (2) the financial ability of the region in the implementation of regional autonomy in Central Lombok West Nusa Tenggara (NTB) 2010-2013 average are in the category of small so it can be said of Central Lombok district has not been able to implement regional autonomy when viewed from the local financial capacity , from the calculation of financial ratios among other areas of local financial independence ratio, the ratio of the degree of fiscal decentralization, routine capability index ratio, the ratio of harmony, and the ratio of growth, the growth rate only describe Central Lombok bit capable in carrying out regional autonomy, and (3) Contributions to the local Revenue and Expenditure Budget 2010-2013 year in supporting the implementation of regional autonomy in Central Lombok is still small.

Keywords: the implementation of regional autonomy, local financial capacity, PAD

PENDAHULUAN

Organisasi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi *non profit* yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan mutu pendidikan, peningkatan mutu kesehatan, keamanan dan lain-lain. Dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan persaingan global serta tuntutan reformasi, diperlukan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi bergeser ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional.

Menurut Ryaas Rasyid (2002:33), otonomi daerah dalam konteks ekonomi bermakna sebagai perluasan kesempatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengejar kesejahteraan dan memajukan dirinya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 5, "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Widjaja (2004:76) memberikan penjelasan bahwa tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah menurut Yuliati (2001:22), adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Widjaja (2002 :147), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Salah satu elemen yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal yang merupakan komponen utama dari desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah dan menandai dimulainya babak baru dalam pembangunan daerah serta masyarakatnya dalam mengelola sumber daya/segenap potensi yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Menurut Saragih (2003), desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam kerangka keseimbangan fiskal. Menurut Kuncoro (2004:8) "indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah".

Kebijakan fiskal biasanya diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) pada tingkat nasional, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tingkat daerah. Lebih lanjut Widjaja (2001:67), mengemukakan bahwa "Anggaran Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab". Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 17, "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah". APBD merupakan suatu gambaran atau tolok ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun struktur APBD berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah, (2) Belanja Daerah, dan (3) Pembiayaan Daerah. Pada dasarnya sumber pendapatan daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah, dan (4) Lain-lain penerimaan yang sah (Widjaja, 2002:110).

Menurut Halim (2004: 94), "pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", sedangkan pengertian PAD menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa "pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah". UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: (1) Hasil pajak daerah, (2) Hasil retribusi daerah, (3) Hasil perusahaan milik daerah, dan (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Widodo (dalam Halim, Syam Kusufi, 2013:L-3) "analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia". Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Menurut Halim (2007) beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD sebagai berikut (a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, (b) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menggambarkan besanya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, (c) Rasio Indeks Kemampuan Rutin menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya. Semakin tinggi rasio Indeks Kemampuan Rutin, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah, (d) Rasio Keserasian menggambarkan keseimbangan antara alokasi dana pemerintah daerah pada belanja rutin dan

belanja pembangunan. Semakin tinggi rasio Keserasian, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah, (e) Rasio Pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari tahun ke tahun lainnya.

Total Pendapatan Asli daerah Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2010-2013 terus meningkat. Pada tahun 2010 persentase realisasinya mencapai 67,77%, sedangkan pada tahun 2011 mencapai 88,80% atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2012, meskipun realisasi anggarannya meningkat dari tahun 2011 akan tetapi persentase peningkatannya menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 70,81%, akan tetapi pada tahun 2013 baik realisasi anggaran maupun persentase peningkatannya meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 107,50%. Total dana perimbangan Kabupaten Lombok Tengah yang bersumber dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yaitu dari tahun 2010-2013 terus meningkat. Pada tahun 2010 persentase realisasi dana perimbangan mencapai 98,38%, sedangkan pada tahun 2011 mencapai 98,65% atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2012, persentasenya pun meningkat yaitu mencapai 99,28% atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2011. Begitu pula pada tahun 2013, persentasenya meningkat yaitu mencapai 99,97% atau meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.. Peningkatan dana perimbangan dari tahun ketahun tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Tengah masih banyak bergantung kepada bantuan pemerintah pusat. Kemudian untuk pendapatan lain-lain yang sah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tidak ada yang terealisasi, kecuali pada tahun 2013 pendapatan lain-lain yang sah mencapai 63,94%. Adapun judul yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah "Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi

Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2010-2013)".

METODE

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Lombok Tengah, Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah tahun 2010-2013. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif berupa, penggambaran secara kualitatif fakta, data atau objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan berupa ungkapan bahasa atau wacana melalui interpretasi yang tepat dan sistematis, sedangkan metode deskriptif kuantitatif merupakan penggambaran secara kuantitatif atau yang berbentuk bilangan atau angka dengan menggunakan metode matematis.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah yaitu di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Lombok Tengah dan Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah kemampuan keuangan daerah dan otonomi daerah kabupaten Lombok Tengah tahun 2010-2013.

Ditinjau dari karakteristik atau sifatnya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Ditinjau dari sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh bersumber dari hasil wawancara yang berupa pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan data sekunder berasal dari data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan dan arsip-arsip yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah mengenai jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010-2013 dan dokumen-dokumen atau catatan dan arsip-arsip yang dimiliki Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah mengenai jumlah APBD tahun 2010-2013.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melihat catatan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010-2013. Adapun data yang dicari dengan metode ini adalah: (1) penerimaan PAD Lombok Tengah tahun 2010-2013 dan (2) APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010-2013. Teknik wawancara, teknik ini dilakukan sebagai pendukung dari teknik dokumentasi di atas. Teknik wawancara digunakan ketika ada hal-hal yang peneliti kurang mengerti atau kurang jelas dari data yang didapatkan. Wawancara dilakukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk memperoleh data PAD Kabupaten Lombok Tengah dan Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk memperoleh data berupa APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010-2013.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Jadi metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rasio keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan 5 (lima) rasio.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lombok Tengah disesuaikan dengan kondisi *real* masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Konsekuensi logis adanya otonomi daerah, maka kewenangan daerah Kabupaten Lombok Tengah pasti akan bertambah besar, oleh karena itu dengan adanya kewenangan tersebut maka daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan mudah dalam melaksanakan tugas dan akan lebih merasakan manfaat dari otonomi daerah itu sendiri, misalkan dapat mengembangkan inovasi-inovasi yang dapat mengembangkan Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan hasil perhitungan, rasio kemandirian selama empat tahun terakhir (2010-2013) mengalami peningkatan, akan tetapi peningkatannya tersebut masih dalam kategori kemampuan keuangan rendah sekali dengan pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat sangat dominan dari pada peranan daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio kemandirian yang dihasilkan dari tahun 2010-2013 yaitu masih berkisar antara 0,00% - 25,00%.

Rasio kemandirian yang masih rendah dikarenakan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat. Apabila digambarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010-2013 tersebut, maka akan nampak seperti pada gambar 1 berikut.

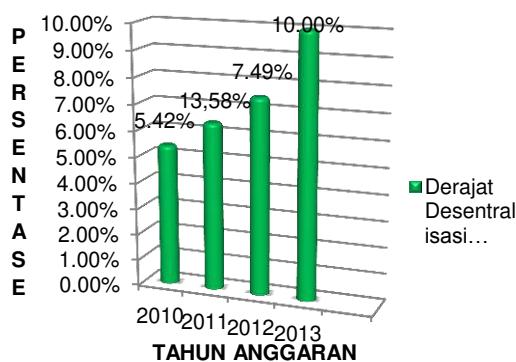


Gambar 1 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2013

Berdasarkan hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan akan tetapi peningkatannya tersebut masih menunjukkan sangat kurangnya penerimaan yang diperoleh berdasarkan pendapatan asli daerah apabila dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Rendahnya perolehan persentase rasio derajat desentralisasi

fiskal yang dimiliki Kabupaten Lombok Tengah yang masih berada pada interval 0,00% - 10,00% menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Lombok Tengah belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri dengan kata lain masih bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Apabila hasil dari rasio derajat desentralisasi fiskal ini dipadukan dengan hasil perhitungan rasio kemandirian, maka akan terlihat sangat jelas bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah secara keseluruhan masih relatif sangat kecil, maka dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan daerah dinilai masih sangat rendah.

Apabila digambarkan hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010-2013, maka akan nampak seperti pada gambar 2 berikut.



Gambar 2 Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2013.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat digambarkan bahwa Indeks Kemampuan Rutin di Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2010-2013 dapat dikatakan masih dalam skala yang sangat kurang, karena masih berada pada skala interval antara 0,00%-20,00% atau rata-rata IKRnya sebesar 10,39% dan ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah belum mempunyai kemampuan dalam membiayai pengeluaran rutin, hal ini terjadi karena PAD Kabupaten Lombok Tengah sangat kecil apabila dibandingkan dengan nilai belanja rutin, dan selama ini lebih banyak

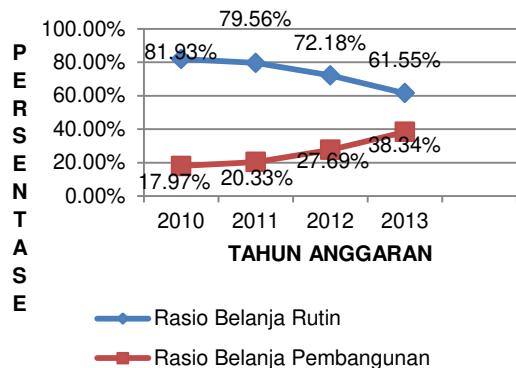
bergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat. Apabila digambarkan hasil perhitungan rasio indeks kemampuan rutin Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010-2013, maka akan nampak seperti pada gambar 3 berikut.



Gambar 3 Hasil Perhitungan Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2013

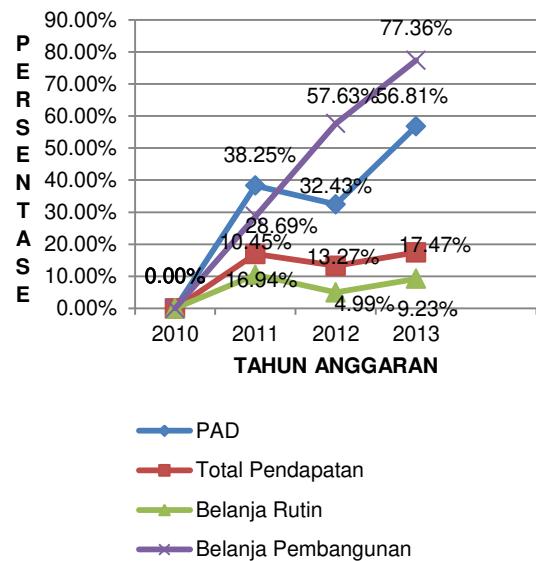
Berdasarkan hasil perhitungan rasio keserasian Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010-2013, meskipun rasio belanja rutin mengalami penurunan setiap tahunnya dan rasio belanja pembangunan mengalami peningkatan setiap tahunnya akan tetapi hal tersebut masih menunjukkan rendahnya rasio belanja pembangunan apabila dibandingkan dengan rasio belanja rutin, akan tetapi dengan melihat hasil perhitungan tersebut untuk belanja pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah sudah mulai meningkat. Di mana hasil rata-rata rasio belanja pembangunan sebesar 26,08%, sedangkan rata-rata rasio belanja rutin sebesar 73,80%.

Apabila digambarkan hasil perhitungan rasio keserasian Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010-2013 tersebut, maka akan nampak seperti pada gambar 4 berikut.



Gambar 4 Hasil Perhitungan Rasio Keserasian Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2013

Berdasarkan hasil perhitungan yang menggambarkan bahwa kondisi pertumbuhan APBD Kabupaten Lombok Tengah dapat disimpulkan bahwa APBD pada tahun 2010-2013 menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang positif. Hal ini diakibatkan karena pertumbuhan nilai PAD, total pendapatan daerah, dan belanja pembangunan yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja rutin. Artinya bahwa, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sudah cukup mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari tahun satu ke tahun berikutnya dan terbukti bahwa persentase belanja pembangunan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2010-2013 mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya, akan disajikan gambar 5 yang menunjukkan pertumbuhan APBD yang dilihat dari berbagai komponen penyusunan APBD yang terdiri dari PAD, total pendapatan daerah, belanja pembangunan, dan belanja rutin.



Gambar 5 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2010-2013

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan pengaruh yang lebih baik bagi kemampuan keuangan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri terutama dalam hal pemenuhan aspirasi masyarakat atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan untuk meningkatkan proses pembangunan dalam segala bidang.

Berdasarkan hasil perhitungan bahwa untuk tahun 2010 kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 5.42%, kemudian tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar 6.41 %, begitu pula pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 7.49% dan untuk tahun 2013 meningkat lagi menjadi 10.00%. Dapat dilihat bahwa PAD Kabupaten Lombok Tengah memang setiap tahunnya mengalami peningkatan secara signifikan, akan tetapi peningkatannya tersebut relatif kecil, sehingga penerimaan dari PAD tersebut belum mampu untuk menutupi seluruh belanja yang ada di daerah Kabupaten Lombok Tengah itu sendiri.

Pembahasan

Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah tersebut maka masing-masing daerah mempunyai kesempatan dengan leluasa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan) mengatur urusan daerah masing-masing. Begitu pula yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, sehingga dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah, maka pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan otonomi daerah ini disesuaikan dengan kondisi *real* masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Konsekuensi logis adanya otonomi daerah, maka kewenangan daerah Kabupaten Lombok Tengah pasti akan bertambah besar, oleh karena itu dengan adanya kewenangan tersebut maka daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan mudah dalam melaksanakan tugas dan akan lebih merasakan manfaat dari otonomi daerah itu sendiri, misalkan dapat mengembangkan inovasi-inovasi yang dapat mengembangkan Kabupaten Lombok Tengah.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lombok Tengah NTB tahun 2010-2013 dapat dilihat dari hasil perhitungan 5 rasio keuangan terhadap APBD yang antara lain, rasio Kemandirian Keuangan Daerah dari tahun 2010-2013 meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan, akan tetapi rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah masih dalam kategori kemampuan keuangan rendah sekali dengan pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat sangat dominan dari pada peranan daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio kemandirian yang dihasilkan setiap tahunnya yaitu masih berkisar antara 0,00% - 25,00%. Rasio kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan

daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat. Artinya bahwa jika dilihat dari hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah, maka dapat dikatakan kemampuan keuangan daerah belum mampu untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Sementara itu, berdasarkan hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan akan tetapi peningkatannya tersebut masih menunjukkan sangat kurangnya penerimaan yang diperoleh berdasarkan pendapatan asli daerah apabila dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Yang di mana kemampuan keuangan berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal tahun 2010-2013 masih sangat kurang, karena setiap tahunnya masih berada pada interval 0,00%-10,00%. Artinya bahwa jika dilihat dari hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Lombok Tengah, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan daerah belum mampu untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lombok Tengah NTB tahun 2010-2013 dapat dilihat dari hasil perhitungan 5 rasio keuangan terhadap APBD yang antara lain, rasio Kemandirian Keuangan Daerah dari tahun 2010-2013 meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan, akan tetapi rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah masih dalam kategori kemampuan keuangan rendah sekali dengan pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat sangat dominan dari pada peranan daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio kemandirian yang dihasilkan setiap tahunnya yaitu masih berkisar antara 0,00% - 25,00%.

Rasio kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam membiayai pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat. Artinya bahwa jika dilihat dari hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah, maka dapat dikatakan kemampuan keuangan daerah belum mampu untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Selanjutnya dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Indeks Kemampuan Rutin di Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2010-2013 meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan, akan tetapi dapat dikatakan masih dalam skala yang sangat kurang, karena masih berada pada skala interval antara 0,00%-20,00% atau rata-rata IKRnya sebesar 10,39% dan ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kemampuan yang sangat kurang dalam membiayai pengeluaran rutin, hal ini terjadi karena PAD Kabupaten Lombok Tengah sangat kecil apabila dibandingkan dengan nilai belanja rutin, dan selama ini lebih banyak bergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat. Artinya bahwa jika dilihat dari hasil perhitungan Rasio Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Lombok Tengah, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan daerah belum mampu untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Selanjutnya dari hasil perhitungan rasio keserasian Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010-2013, meskipun rasio belanja rutin mengalami penurunan setiap tahunnya dan rasio belanja pembangunan mengalami peningkatan setiap tahunnya akan tetapi hal tersebut masih menunjukkan rendahnya rasio belanja pembangunan apabila dibandingkan dengan rasio belanja rutin. Di mana hasil rata-rata rasio belanja pembangunan sebesar 26,08%, sedangkan rata-rata rasio belanja rutin sebesar 73,80%, akan tetapi dengan melihat hasil perhitungan tersebut untuk belanja pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah sudah mulai meningkat. Artinya bahwa jika dilihat dari hasil perhitungan Rasio Keserasian Kabupaten Lombok Tengah, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan daerah belum mampu untuk mendukung

pelaksanaan otonomi daerah karena pengeluaran rutin masih besar jika dibandingkan dengan pengeluaran pembangunan yang ada.

Selanjutnya untuk rasio pertumbuhan, dari hasil penelitian dapat menggambarkan bahwa kondisi pertumbuhan APBD Kabupaten Lombok Tengah dapat disimpulkan bahwa APBD pada tahun 2010-2013 menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang positif. Hal ini diakibatkan karena pertumbuhan nilai PAD, total pendapatan daerah, dan belanja pembangunan yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja rutin. Artinya bahwa, pemerintah kabupaten Lombok Tengah sudah cukup mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari tahun satu ke tahun berikutnya dan terbukti bahwa persentase belanja pembangunan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Artinya bahwa jika dilihat dari hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten Lombok Tengah, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan daerah sudah sedikit mampu dalam mendukung pelaksanaan otonomi. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa PAD Kabupaten Lombok Tengah memang dari tahun 2010-2013 mengalami peningkatan secara signifikan, akan tetapi peningkatannya tersebut relatif kecil, sehingga penerimaan dari PAD tersebut belum mampu untuk menutupi seluruh belanja yang ada di daerah Kabupaten Lombok Tengah itu sendiri. Artinya bahwa kontribusi PAD terhadap APBD dari tahun 2010-2013 di Kabupaten Lombok Tengah masih kecil.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lombok Tengah NTB tahun 2010-2013 dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi *real* masyarakatnya, dan dengan melihat urusan-urusan yang dilaksanakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang wujudnya itu hampir 99% urusan tersebut sudah

didelegasikan ke SKPD-SKPD untuk dijalankan sesuai dengan aspirasi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.

Tingkat kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lombok Tengah NTB tahun 2010-2013 rata-rata berada dalam katagori yang kecil sehingga dapat dikatakan Kabupaten Lombok Tengah belum mampu untuk melaksanakan otonomi daerah jika dilihat dari kemampuan keuangan daerah. Dari hasil perhitungan rasio keuangan daerah yang antara lain rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan, hanya rasio pertumbuhan yang menggambarkan Kabupaten Lombok Tengah sudah cukup mampu dalam menjalankan otonomi daerah.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2010-2013 dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lombok Tengah masih kecil meskipun terjadi peningkatan setiap tahunnya, sehingga penerimaan PAD tersebut belum mampu untuk menutupi seluruh belanja yang ada di daerah Kabupaten Lombok Tengah itu sendiri. Artinya bahwa konstribusi PAD terhadap APBD dari tahun 2010-2013 di Kabupaten Lombok Tengah masih kecil.

Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh penulis, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yakni sebagai berikut.

Bagi pemerintah setempat hendaknya lebih mengoptimalkan potensi pajak daerah yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yang selama ini belum sepenuhnya terjamah oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sendiri, baik itu terkait dengan pajak hotel, pajak sarang burung walet dan potensi pajak lainnya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Bagi pemerintah setempat hendaknya juga lebih mengoptimalkan potensi retribusi daerah yang ada di Kabupaten Lombok Tengah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Bagi pemerintah Kabupaten Lombok Tengah hendaknya lebih tegas kepada wajib pajak dalam hal pemungutan pajak sebagai penunjang pendapatan daerah.

Bagi peneliti lain hendaknya dilakukan di beberapa kabupaten sehingga nantinya terdapat perbandingan antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Artana, Made. 2004. *Buku Ajar Perpajakan*. Singaraja: Departemen Pendidikan Nasional IKIP Negeri Singaraja.
- Baswir, Revisond. 1999. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta.
- Frediyanto, Yanuar. 2010. *Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah*. Skripsi (tidak diterbitkan). Jurusan Ekonomi Pembangunan FE, Universitas Dipenogoro.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jusmawati. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi (tidak diterbitkan). Jurusan Manajemen, Universitas Hasanuddin.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Yogyakarta: Erlangga.

- Ladjin, Nurjanna. 2008. Tesis. *Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah (studi kasus di Provinsi Sulawesi Tengah)*. (Online) (http://eprints.undip.ac.id/18492/1/NU_RJANNA_LADJIN.pdf di akses tanggal 18 Januari 2014).
- Nataluddin. 2001. *Potensi dana perimbangan pada pemerintahan daerah di Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Rasyid, Ryaas. 2002. *Menolak Resentralisasi Pemerintahan (Draft Revisi UU no. 22, 1999 versi Depdagri)*. Jakarta: Millennium Publisher PT. Dyatama Milenia.
- Rizkiano, Aswin. 2011. *Pengukuran Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2004-2008 Di Kota Salatiga*. Skripsi (tidak diterbitkan). Jurusan Ekonomi Pembangunan FE, Universitas Dipenogoro.
- Royani, Ida. 2012. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Ponorogo Dan Madiun Tahun Anggaran 2008-2010*. Skripsi (tidak diterbitkan). Jurusan Akuntansi FE, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Sabeni, Arifin dan Imam Ghazali. 1995. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Savitry, Ermitha. 2013. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2007-2011 Di Kota Makassar*. Skripsi (tidak diterbitkan). Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin.
- Siregar, Baldric dan Bonni Siregar. 1998. *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*. Yogyakarta: Bagian penerbitan STIE YKPN.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik (Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah)*. Yogyakarta: Andi.
- Suwandi, Ari. 2011. *Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Kontribusinya Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2009*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir UNDIKSHA. 2009. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir Program Sarjana dan Diploma Universitas Pendidikan Ganesha*. Singaraja: Percetakan UNDIKSHA.
- Ulum, Ihyaul. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Malang: Bumi Aksara.
- UU No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia (Presiden Republik Indonesia).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia (Presiden Republik Indonesia).
- Widjaja, H.A.W. 2001. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, H.A.W. 2004. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, H.A.W. 1998. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.

